



Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Tahun 2024 Melalui Kampanye Media Sosial

Irman Puansah¹⁾, Darman Syah Pulungan²⁾, Vernando maruli aruan³⁾, Natalia Parapat⁴⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

Korespondensi: irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. Pilkada tahun 2024 di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama karena rendahnya literasi politik dan maraknya penyebaran hoaks. Artikel ini membahas bagaimana kampanye media sosial dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis efektivitas media sosial dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kampanye digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok berperan dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Namun, efektivitas kampanye ini dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, strategi komunikasi yang digunakan, serta dukungan dari penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas. Untuk memastikan keberhasilan kampanye digital dalam pengawasan Pilkada, diperlukan edukasi literasi digital yang lebih intensif, koordinasi antar-stakeholder, serta pemanfaatan teknologi pelaporan yang lebih transparan. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemilu, Pilkada 2024, Media Sosial, Literasi Politik

Abstract

Public participation in the oversight of regional head elections is a crucial element in ensuring transparency and accountability in the democratic process. The 2024 Pilkada in Indonesia faces challenges in enhancing public engagement, particularly due to low political literacy and the widespread dissemination of misinformation. This article examines how social media campaigns can be utilized as a strategy to increase public participation in electoral oversight. Through a literature review, this study analyzes the effectiveness of social media in promoting civic engagement and identifies the factors that influence the success of digital campaigns. The findings indicate that platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok play a significant role in disseminating information, raising political awareness, and providing a space for citizens to engage in electoral monitoring. However, the effectiveness of these campaigns is influenced by the level of digital literacy, the communication strategies employed, and the support from election organizers and supervisory bodies. To ensure the success of digital campaigns in Pilkada oversight, there is a need for more intensive digital literacy education, better coordination among stakeholders, and the adoption of more transparent reporting technologies. With the right strategies, social media can serve as an effective tool in promoting fair, honest, and democratic elections.

Key words: Public Participation, Election Oversight, 2024 Regional Elections, Social Media, Political Literacy



PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu mencegah praktik kecurangan, seperti politik uang, mobilisasi pemilih ilegal, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Dalam konteks Pilkada tahun 2024 di Indonesia, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan inovatif, salah satunya melalui kampanye media sosial.

Media sosial telah menjadi platform yang efektif dalam mendorong partisipasi politik, terutama dalam membangun kesadaran publik dan memobilisasi aksi kolektif. Dalam berbagai penelitian, media sosial secara umum berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan (Dwitama et al., 2022). Selanjutnya (Kharisma Wirayanti & Ananda Putra, 2024) menegaskan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui kampanye berbasis media sosial, masyarakat lebih sadar akan hak pilihnya, lebih memahami proses pemilu, dan lebih terlibat dalam diskusi politik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen edukasi politik yang efektif. Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, kampanye pengawasan berbasis media sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal Pilkada.

Namun, penggunaan media sosial dalam pengawasan pemilu juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan pemilu, tantangan seperti hoaks, polarisasi opini, bias media, rendahnya literasi digital, dan manipulasi algoritma dapat menghambat efektivitasnya (Studi et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola kampanye pengawasan berbasis media sosial agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif dan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran kampanye media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tahun 2024. Dengan menggali teori dan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi efektif dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pengawasan pemilu yang lebih demokratis dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, berita media, dan dokumen resmi. Studi literatur berarti mengumpulkan dan menganalisis teori dari buku, jurnal, dan penelitian untuk mendukung ide dan gagasan penelitian (Puansah et al., n.d.). (Puansah, Pulungan, et al., 2024), (Puansah, Sukmana, et al., 2024), (Puansah, Pulungan, et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi studi kasus tertentu untuk memberikan wawasan rinci mengenai fenomena ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Instrumen Kampanye Pengawasan Pilkada

Berbagai platform media sosial digunakan dalam pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Facebook menjadi salah satu media utama yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait pemilu, kampanye politik, serta sebagai sarana interaksi antara kandidat dan pemilih. Twitter juga memiliki peran penting sebagai media komunikasi cepat antara penyelenggara pemilu, politisi, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi atau opini politik. Selain itu, Instagram dimanfaatkan untuk membangun citra politik melalui konten visual seperti foto dan video yang menarik perhatian publik. YouTube digunakan sebagai sarana penyebaran video kampanye, debat politik, serta edukasi pemilu yang lebih mendalam. Sementara itu, TikTok semakin populer sebagai platform bagi politisi dan partai politik untuk menjangkau pemilih muda melalui konten kreatif dan interaktif. Selain media sosial, platform lain seperti situs web berita

online, podcast, dan platform edukasi digital juga berperan dalam menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam pemilu (Arpandi, 2023) (Fajri et al., 2024)(Arumsari et al., 2020).

Platform media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat selama pemilu. Kehadiran media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait pemilu, kandidat, dan kebijakan politik yang ditawarkan. Selain itu, media sosial juga menciptakan ruang interaksi antara pemilih, kandidat, dan penyelenggara pemilu, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Facebook menjadi salah satu platform utama yang digunakan dalam pemilu karena memiliki pengguna yang sangat banyak dan beragam. Melalui Facebook, kandidat dan partai politik dapat menyebarkan informasi kampanye, berkomunikasi dengan pendukung, serta membangun komunitas politik. Fitur seperti grup dan halaman memungkinkan diskusi publik terkait isu-isu politik yang berkembang, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.

Twitter berperan sebagai media komunikasi cepat antara penyelenggara pemilu, politisi, dan masyarakat. Dengan format cuitan singkat dan penggunaan tagar (hashtag), Twitter menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan berita terbaru, klarifikasi informasi, dan mendiskusikan isu-isu politik secara real-time. Politisi juga sering menggunakan Twitter untuk menyampaikan pendapat dan merespons berbagai isu yang sedang berkembang selama pemilu.

Instagram dimanfaatkan untuk membangun citra politik melalui konten visual yang menarik. Dengan fitur seperti foto, video pendek, Instagram Stories, dan IG Live, politisi dan partai politik dapat menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda. Visualisasi yang menarik membantu menyampaikan pesan kampanye dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik bagi khalayak luas.

YouTube berfungsi sebagai sarana penyebaran video kampanye, debat politik, serta edukasi pemilu. Platform ini memungkinkan kandidat untuk membagikan video pidato, perdebatan, dan program kerja mereka secara lebih mendalam. Video-video yang diunggah juga dapat diakses kapan saja oleh masyarakat, sehingga memberikan pemilih kesempatan untuk mempelajari visi dan misi kandidat sebelum menentukan pilihan mereka.

TikTok semakin populer dalam dunia politik, terutama untuk menjangkau pemilih muda. Dengan format video pendek yang kreatif dan interaktif, politisi dan partai politik dapat menyampaikan pesan kampanye dengan cara yang lebih santai dan menghibur. TikTok juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini politik mereka melalui tren dan tantangan yang viral, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pemilih muda dalam pemilu.

Selain media sosial, platform lain seperti situs web berita online, podcast, dan platform edukasi digital juga memainkan peran dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Situs berita online menyajikan informasi terkini mengenai pemilu, sedangkan podcast memungkinkan diskusi politik yang lebih mendalam dan dapat diakses kapan saja. Platform edukasi digital, seperti website resmi penyelenggara pemilu, menyediakan informasi yang akurat dan transparan terkait proses pemilu, sehingga membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Dengan pemanfaatan berbagai platform media sosial dan digital ini, proses demokrasi menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap informasi politik, sementara politisi dan penyelenggara pemilu dapat berinteraksi langsung dengan pemilih, menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih aktif dan inklusif.

Strategi kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran pengawasan pemilu dilakukan melalui penyebaran informasi di media sosial, portal berita, dan website resmi penyelenggara pemilu. Media sosial dimanfaatkan sebagai ruang interaksi dua arah, memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung. Kampanye ini juga mencakup edukasi literasi digital untuk mengenali hoaks serta melibatkan influencer dan tokoh publik guna memperluas

jangkauan pesan. Selain itu, layanan pengaduan digital seperti aplikasi dan website disediakan untuk meningkatkan transparansi. Dengan konten kreatif seperti infografis dan video pendek, strategi ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam memastikan pemilu yang transparan dan demokratis (Arpandi, 2023).

Strategi kampanye digital dalam meningkatkan kesadaran pengawasan pemilu melibatkan beberapa pendekatan utama melalui penggunaan media sosial. Berikut adalah strategi yang digunakan (Salman Farid, 2023):

1. Pemanfaatan Platform Media Sosial

Kampanye digital menggunakan berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya pengawasan pemilu. Platform ini memungkinkan komunikasi dua arah antara pemilih dan penyelenggara pemilu, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

2. Penyebaran Informasi yang Cepat dan Interaktif

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi tentang prosedur pemilu, peraturan, serta cara melaporkan pelanggaran dengan cepat. Melalui fitur seperti live streaming, unggahan video edukasi, dan infografis, pemilih lebih mudah memahami cara berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

3. Kampanye Edukasi dan Literasi Digital

Salah satu tantangan dalam pengawasan pemilu adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, kampanye digital juga berfokus pada edukasi literasi digital, mengajarkan pemilih cara mengenali berita palsu dan mendorong mereka untuk hanya mempercayai informasi dari sumber resmi.

4. Mobilisasi Partisipasi Melalui Hashtag dan Tantangan Online

Penggunaan hashtag populer dan kampanye viral di media sosial dapat mendorong lebih banyak orang untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu. Misalnya, kampanye dengan tagar seperti #PantauPemilu atau #AyoAwasiPemilu bisa digunakan untuk mengajak masyarakat aktif melaporkan pelanggaran.

5. Pemberdayaan Influencer dan Tokoh Publik

Para influencer, jurnalis, dan tokoh masyarakat sering digunakan dalam kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran tentang pengawasan pemilu. Mereka dapat membuat konten edukatif atau melakukan diskusi online guna menarik perhatian audiens yang lebih luas.

6. Penyediaan Saluran Pelaporan Digital

Kampanye digital juga mendukung pengawasan pemilu dengan menyediakan portal atau aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara langsung. Ini membantu memastikan transparansi dalam proses pemilu dan mempermudah tindak lanjut terhadap laporan yang masuk.

Melalui strategi ini, kampanye digital tidak hanya meningkatkan kesadaran pemilih terhadap pengawasan pemilu tetapi juga mendorong keterlibatan mereka dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukka bahwa terdapat beberapa daerah menggunakan media sosial dalam melakukan kampanye pengawasan melalui media sosial diantaranya, (Afnira, 2023) Membahas optimalisasi media sosial sebagai sarana publikasi pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang. Bawaslu bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu dan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran. Untuk meningkatkan keterlibatan publik, Bawaslu memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube dalam menyebarkan informasi pengawasan pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang telah mengimplementasikan strategi public relations dalam

mengelola media sosial, yang mencakup empat tahap: identifikasi masalah, perencanaan dan pemrograman, tindakan dan komunikasi, serta evaluasi program.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi strategi ini, seperti minimnya respons masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan serta kurangnya indikator untuk mengukur efektivitas kampanye digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan, peningkatan kreativitas dalam produksi konten, serta pelibatan lebih banyak tokoh publik dan komunitas digital guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu melalui media sosial.

Selanjutnya (Putri et al., 2024) membahas aksesibilitas pengawasan media sosial oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah kampanye propaganda. Media sosial menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi politik, namun juga rentan terhadap penyalahgunaan, seperti propaganda yang dapat memengaruhi opini publik.

Bawaslu telah mengembangkan inovasi seperti aplikasi Gowaslu, yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye secara daring. Namun, pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya jumlah personel, pesatnya penyebaran informasi, serta banyaknya akun anonim yang menyebarkan propaganda. Selain itu, masih ada isu terkait perlindungan bagi pelapor, yang membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran.

Secara keseluruhan, aksesibilitas pengawasan media sosial oleh Bawaslu masih belum optimal. Diperlukan peningkatan strategi, seperti edukasi literasi digital, peningkatan koordinasi dengan platform media sosial, serta penegakan hukum yang lebih kuat agar pengawasan kampanye di media sosial dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Dampak dan Efektivitas Kampanye Media Sosial dalam Pengawasan Pilkada

Media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Media sosial berfungsi sebagai platform utama dalam penyebaran informasi politik, edukasi pemilih, komunikasi dua arah antara warga dan pemimpin, serta mobilisasi kampanye.

Di Desa Candirejo, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter telah membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan menyediakan akses informasi yang cepat dan mudah. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk berdiskusi, berbagi opini, serta mengawasi jalannya pemilu secara lebih aktif. Selain itu, media sosial juga memungkinkan warga melaporkan pelanggaran pemilu dan menekan pejabat publik agar bertindak sesuai dengan aturan (Chairunisa et al., 2024).

Namun, efektivitas media sosial dalam pengawasan pemilu masih menghadapi beberapa tantangan, seperti penyebaran informasi hoaks, minimnya literasi digital, dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam mengelola informasi politik di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi digital, infrastruktur teknologi, serta pengawasan lebih ketat terhadap informasi politik yang beredar.

Secara keseluruhan, meskipun media sosial memiliki beberapa kelemahan, perannya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tetap signifikan dan dapat dimanfaatkan lebih optimal dengan strategi yang tepat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kampanye pengawasan pemilu melalui media sosial (Banurea, 2023).

1. Strategi Kampanye Digital

Keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi kampanye digital yang digunakan. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok, serta media konvensional seperti televisi dan koran, harus diintegrasikan dengan baik agar jangkauan kampanye lebih luas.

2. Partisipasi Masyarakat

Kampanye pengawasan yang berhasil membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran tinggi atau kurang memahami peran mereka dalam

- pengawasan pemilu, efektivitas kampanye akan berkurang.
3. Literasi Digital dan Penyebaran Hoaks
Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya literasi digital yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi hoaks atau propaganda politik. Kampanye pengawasan yang tidak disertai edukasi digital akan sulit mencapai tujuannya.
 4. Kolaborasi dengan Stakeholder
Kampanye yang melibatkan berbagai pihak, seperti Bawaslu, KPU, lembaga penegak hukum, dan media, lebih efektif dalam mencegah pelanggaran pemilu. Koordinasi yang buruk antar-lembaga dapat menghambat pengawasan
 5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan
Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti aplikasi pelaporan digital dan analisis data media sosial, sangat membantu efektivitas pengawasan. Tanpa inovasi teknologi, pengawasan digital akan sulit dilakukan secara optimal.
 6. Regulasi dan Penegakan Hukum
Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengontrol kampanye digital. Jika aturan terkait pengawasan pemilu tidak ditegakkan dengan baik, maka kampanye pengawasan melalui media sosial akan kurang efektif.

Secara keseluruhan, keberhasilan kampanye pengawasan pemilu melalui media sosial bergantung pada strategi yang efektif, partisipasi masyarakat yang aktif, literasi digital yang baik, kolaborasi antar-stakeholder, serta dukungan regulasi dan teknologi yang memadai.

SIMPULAN

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tahun 2024 di Indonesia melalui kampanye media sosial merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemilu yang transparan dan demokratis. Media sosial terbukti efektif dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan pemanfaatan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, melaporkan pelanggaran, serta berpartisipasi dalam diskusi politik.

Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya literasi politik, penyebaran hoaks, dan minimnya koordinasi antara stakeholder terkait. Oleh karena itu, keberhasilan kampanye digital dalam pengawasan pemilu sangat bergantung pada strategi yang tepat, edukasi literasi digital, serta kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas. Dengan pendekatan yang efektif, kampanye media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1), 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>
- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843–855. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.293>
- Arumsari, N., Septina, W. E., & Saputro, I. H. (2020). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(1), 12–16. <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i1.40271>
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital). *Mediation: Journal of Law*, 2(1), 59–77.
- Chairunisa, P., Putri Barbara, D., Anjelina Saragih, O., & Ivanna, J. (2024). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di. *Journal on Education*, 06(04), 20592–20598.



- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>
- Fajri, N., Fajri, R., & Sulisawati, N. (2024). Transformasi Politik Di Indonesia: Analisis Terhadap Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik Generasi Muda. *Online) Journal of Political Sphere* |, 5(1), 2746–1947. <https://doi.org/10.24815/jps.v5i1.39517>
- Kharisma Wirayanti, L. P. L., & Ananda Putra, I. G. A. (2024). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dan Mengurangi Tingkat Golput di Kelurahan Sumerta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1398–1404. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2995>
- Puansah, I., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (n.d.). *Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* Irman Puansah. 8, 778–787.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>
- Puansah, I., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). *Political Dynasties in Village Government and Their Impact on Society and Development*. 5(2), 119–136.
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Salman Farid, A. (2023). Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik Dan Persepsi Publik. *QAULAN Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 45–50.
- Studi, P., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., & Pendidikan, D. I. (2024). PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT Riska Septa Yuliandri, Siti Tiara Maulia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(11).